BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negara berkembang mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mutlak. Peran penting pemerintah ada pada tiga fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan. Pada fungsi pengaturan, berfungsi sebagai sebuah usaha pemerintah bagaimana menciptakan suatu keadaan yang kondusif atau terciptanya suatu tatanan kehidupan sosial yang baik dalam berbagai kehidupan masyarakat. Pada fungsi pelayanan, pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan rakyatnya. Terakhir pada fungsi pemberdayaan yang bertujuan memberikan ruang yang cukup untuk meningkatkan aktivitas mandiri masyarakat dalam kegiatan pembangunan khususnya pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Fungsi pemberdayaan mendukung terselengaranya otonomi daerah, karena menuntut pemberdayaan masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya daerah. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya daerah juga sangat diperlukan, sehingga dalam proses pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik yakni dengan adanya partisipasi masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah.

Pada kenyataannya kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan itu sendiri masih banyak ditemukan. Kendala yang dihadapi pada pemberdayaan masyarakat seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam suatu kebijakan pemberdayaan. Permasalahan lain yang dihadapi dalam hal pemberdayaan masyarakat yakni tidak adanya pengawasan yang berkelanjutan dari pihak pemerintah, sehingga pada akhirnya kebijakan dalam pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat hanya efektif pada awalnya saja. Keterbatasan informasi dan tenaga ahli yang memadai menjadi kendala tersendiri dalam hal pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanan pemberdayaan masyarakat telah menjadi suatu keharusan untuk turut campur tangan dan aktif sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Peran aktif pemerintah dalam hal pembangunan yakni dalam hal pemberdayaan masyarakat merupakan kunci sukses menuju masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Pelaksanaan otonomi daerah menjadi sebuah perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, salah satunya dalam pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan.

Kota Cimahi merupakan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan dalam mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri, salah satu kewenangan yang menjadi urusan pemerintah Kota Cimahi adalah pemberdayaan masyarakat Kota Cimahi menuju masyarakat yang mandiri. Hal tersebut diwujudkan melalui

kegiatan penanganan sampah secara terpadu yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kota Cimahi sendiri serta di dukung data-data yang ada, Kota Cimahi sendiri dibagi menjadi tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan. Kota Cimahi mempunyai luas wilayah seluas 4.023 Ha terdiri dari 312 RW, 1718 RT. Keadaan penduduk di wilayah Kota Cimahi sampai dengan tahun 2010 tercatat berjumlah 608.143 jiwa atau sekitar 161.777 Kepala Keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk mencapai 151 jiwa/Ha.(*Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, 2011*).

Urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah Kota Cimahi salah satunya adalah kewenangan dalam pengelolaan sampah. Penduduk di Kota Cimahi setiap harinya menyumbangkan lebih dari 283 ton sampah dengan tempat penampungan sampah yang tersedia sebanyak 20 Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pemerintah Kota Cimahi menangani sampah dengan cara mengambil, mengangkut, dan menbuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Pola penanganan sampah seperti ini akan jika tidak ditangani dengan serius, maka akan terjadi penumpukan sampah yang tidak terkendali dengan baik dan akibatnya dapat merugikan masyarakat Kota Cimahi itu sendiri seperti menimbulkan bau, pencemaran lingkungan dan wabah penyakit. Pembuangan sampah ke TPA Sarimukti mengakibatkan pula pemerintah Kota Cimahi harus membayar biaya sewa tempat pembuangan sehingga mengurangi dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi. Dilihat dari jumlah penduduk Kota

Cimahi yang terbilang padat sehingga akan menghasilkan jumlah sampah yang tinggi pula dan apabila masalah penanganan sampah ini tidak serius maka menjadi permasalahan yang besar jika tidak ditangani secara perlahan dan terus-menerus.

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sampai saat ini terjadi dibanyak kota-kota besar. Sampah pada dasarnya dianggap sebagai suatu bahan yang terbuang dari hasil kegiatan manusia atau proses alam yang sudah tidak berfungsi lagi. Akibat dari anggapan masyarakat mengenai sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomi lagi, terjadi penumpukan sampah. Budaya dari masyarakat itu sendiri yang tidak membiasakan membuang sampah pada tempatnya mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, penumpukan sampah dimana-mana dan menimbulkan wabah penyakit. Dampaknya masyarakat itu sendiri yang mengalami kerugian akibat kurang kesadaran membuang sampah. Hal tersebut tentu saja menuntut aparat pemerintah yang berwenang untuk dapat menjalankan pengelolaan sampah secara cepat dan efektif.

Permasalahan sampah yang terjadi di Kota Cimahi, maka dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) mendorong pemerintah Kota Cimahi untuk menangani sampah dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, kemudian pemerintah Kota Cimahi menerapkan Program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Program 3R merupakan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan yaitu dengan cara mengurangi jumalah sampah (*reduce*), memanfaatkan kembali sampah (*reuse*), mendaur ulang

sampah (*recycle*). Pengelolaan sampah dengan Program 3R ditangani dengan metode dari hulu ke hilir, dengan kata lain proses nya dari awal hingga ke akhir sehingga pengelolaan sampah tidak hanya di TPA saja.

Pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Paradigma baru tersebut lebih ditekankan kepada metode pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Metode tersebut lebih menekankan kepada tingkat perilaku konsumtif dari masyarakat serta kesadaran terhadap kerusakan lingkungan akibat bahan tidak terpakai lagi yang berbentuk sampah sehingga pengelolaan sampah melalui sistem 3R sangat bergantung pada kemauan masyarakat dalam merubah perilaku, yaitu dari pola pembuangan sampah konvensional menjadi pola pemilah sampah.

Pengurangan sampah dengan Program 3R berbasis masyarakat lebih menekankan kepada cara pengurangan sampah yang dibuang oleh individu, rumah, atau kawasan seperti RT ataupun RW. Dari pendekatan tersebut, maka didalam pelaksanaan pengelolaan sampah Program 3R berbasis masyarakat terdapat tiga kegiatan yang dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, yaitu proses pengelolaan sampah sejak dikeluarkan oleh masyarakat, proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan Program 3R, proses pendampingan kepada masyarakat pelaku Program 3R.

Pengurangan sampah dengan Program 3R memang bukan hal mudah untuk dilakukan karena kendala yang dihadapi dalam penerapan Program 3R diantaranya kurangnya penyuluhan mengenai Program 3R, kurang pengawasan dari pihak terkait mengenai Program 3R, kemudian keterbatasan tenaga ahli

dalam menjalankan Program 3R, serta keterbatasan sarana dan biaya dalam pelaksanaan Program 3R sangat bergantung pada kemauan masyarakat dalam merubah perilaku, yaitu dari pola pembuangan sampah konvensional menjadi pola pemilah sampah.

Program 3R juga merupakan sistem yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat juga dituntut untuk lebih aktif dalam mengelola sampah rumah tangga sendiri. Pemberdayaan melalui Program 3R yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Cimahi telah disosialisasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat Kota Cimahi. Salah satunya pemberdayaan pengelolaan sampah melalui Program 3R di Kelurahan Cibeureum.

Pada proses pelaksanaan pemberdayaan di Kelurahan Cibeureum, setelah melakukan observasi awal ada beberapa kendala yang masih dihadapi dalam melaksanakan Program 3R. Ketidakefektifan terjadi di Kelurahan Cibeureum karena kurang partisipasi masyarakat, kemudian aparatur tidak secara maksimal mensosialisasikan Program 3R. Padahal jika Program 3R benar-benar dilaksanakan dengan baik, setidaknya dari jumlah pengangguran Kelurahan Cibeureum yang berjumlah kurang lebih 4.000 orang dari jumlah penduduk sekitar kurang lebih 74.400 jiwa dapat teratasi dengan memanfaatkan Program 3R. Manfaat lain dari Program 3R turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak sedikit hasil dari pengelolaan sampah dengan Program 3R barang yang terbuang menjadi mempunyai nilai ekonomi.

Kurangya kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah menjadi kendala dari program 3R tersebut, dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat

Kelurahan Cibeureum yang rata-rata lulusan Sekolah Dasar (SD) yang mempengaruhi kecerdasan masyarakat dalam mengelola sampah melalui Program 3R. Tingkat kecerdasan masyarakat yang kurang menyebabkan masyarakat tidak mempunyai keterampilan untuk memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat. Tidak adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, hal tersebut menjadi kebiasaan pola hidup masyarakat yang membuang sampah sembarangan, seperti membuang sampah ke kali atau membuang sampah ke selokan-selokan yang menjadi kebudayaan yang sulit ditinggalkan.

Berdasarkan sejumlah pertimbangan dan realitas tersebut, perlu dilakukan penelitian berupa penelusuran mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R di Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi, maka peneliti mengadakan penelitian yang berjudul: "**Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi (Suatu Studi tentang Pengelolaan Sampah melalui Program *Reduce, Reuse, Recycle*)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penjelasan tersebut dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengembangan potensi masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R?
2. Bagaimana kemampuan masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R?

3. Bagaimana perlindungan masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R?
4. Bagaimana dukungan masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R?
5. Bagaimana pemeliharaan masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R di wilayah Kota Cimahi. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengembangan potensi masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.
2. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.
3. Untuk mengetahui perlindungan masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.
4. Untuk mengetahui dukungan masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.
5. Untuk mengetahui pemeliharaan masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara ringkas penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi peneliti

   Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pemberdayaan masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.

2. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan studi Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat.

3. Secara praktis

   Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya aparatur Kelurahan Cibeureum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.